

**MANAJEMEN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI
DESA CIBADAK KECAMATAN RAWAMERTA KABUPATEN
KARAWANG**

**MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES IN CIBADAK
VILLAGE, RAWAMERTA DISTRICT, KARAWANG DISTRICT**

Aldi Muhamad Rizki¹, Evi Priyanti², Gun Gun Gumilar³, Kariena Febriantini⁴

¹⁻⁴Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang,
Indonesia

1910631180137@student.unsika.ac.id¹, evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id², gungun.gumilar@fisip.unsika.ac.id³,
kariena.febriantini@fisip.unsika.ac.id⁴

Abstrak

Manajemen merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam Pemerintah untuk menerapkan suatu program atau kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisa lebih spesifik perihal manajemen yang dilakukan Pemerintah Desa Cibadak dalam mengurus BUMDes di Desa Cibadak Kabupaten Karawang. Penulis menggunakan metode kualitatif dan mengacu pada model teori Henry Fayol terkait manajemen yang baik. Model teori Henry Fayol terkait manajemen yang baik mencakup empat indikator yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil Penelitian penulis di Desa Cibadak yaitu pada perencanaannya, Pemerintah Desa belum dapat melakukan perencanaan BUMDes dengan baik, terbukti tidak sedikit BUMDes yang terhenti. Lalu, pada aspek Pengorganisasian Pada Desa Cibadak, Pemerintah Desa dalam pengorganisasian terkait pengelolaan BUMDes sangat buruk, tidak adanya kemajuan yang baik dalam BUMDes yang aktif atau jalan ditempat. Kemudian pada pelaksanaan, Pemerintah Desa Cibadak belum melaksanakan pengelolaan BUMDes yang baik dan terbilang kurang konsisten. Terakhir pengawasannya, Pengawasan, Pemerintah di Desa yang dilakukan masih sangat minim yang menyebabkan proses berjalannya BUMDes belum menghasilkan keuntungan yang cukup bagi Desa.

Kata Kunci: Manajemen; Pemerintah; Pengelolaan; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Abstract

Management is a very influential aspect in the Government to implement a program or policy. This study aims to analyze more specifically regarding the management carried out by the Cibadak Village Government in managing BUMDes in Cibadak Village, Karawang Regency. The author uses a qualitative method and refers to Henry Fayol's theoretical model regarding good management. Henry Fayol's theoretical model regarding good management includes four indicators, namely planning, organizing, implementing, and controlling. The results of the author's research in Cibadak Village are that in planning, the Village Government has not been able to carry out BUMDes planning properly, it has been proven that not a few BUMDes have stopped. Then, in the aspect of organizing at Cibadak Village, the Village Government in organizing related to BUMDes management is very bad, there is no good progress in active BUMDes or standing still. Then in implementation, the Cibadak Village Government has not implemented good BUMDes management and is somewhat inconsistent. Finally, supervision, supervision, government in the village that is carried out is still minimal, which causes the process of running BUMDes not to generate sufficient profits for the village.

Keywords: Effectiveness; Training; Apparatus; Development

PENDAHULUAN

Pemerintah di lingkup Desa ialah tingkatan pemerintahan yang berposisi rendah, Pemerintah di Desa juga berperan penting guna meningkatkan roda ekonomi rakyat dan

perihal melahirkan citra penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan BUMDes yang baik untuk menciptakan aparatur operasional yang berdaya guna dan berhasil, guna terbentuknya sebuah peningkatan sistem efisiensi ekonomi masyarakat (Arlan, 2019). Desa membutuhkan BUMDes guna peningkatan pemasukan di desa (Koso, dkk., 2018).

BUMDes adalah sebuah badan wajib desa dengan diaktifkan dengan niat masyarakat serta pemerintah di ruang lingkup Desa dengan tujuan memperkokoh roda ekonomi Rakyat desa dan dilahirkan atas pedoman untuk kebutuhan dan kemampuan desa. Arti lain BUMDes ialah Lembaga Desa berpedoman hukum yang dibentuk untuk desa dan untuk mencari pemasukan lain yang menguntungkan (Suhu, dkk., 2020). Terbentuknya BUMDes untuk menggerakkan pembangunan bagi pemerataan ekonomi lokal desa, serta berpedoman pada tujuan, kemampuan, sumber daya desa, kontribusi bantuan permodalan pemerintah di desa berupa keuangan desa atas cita - cita menciptakan peningkatan bagi ekonomi masyarakat di lingkup desa. Filosofi Pembentukan Lembaga yang bernama BUMDes ialah sebagai acuan dalam berjalannya pembangunan di ruang lingkup Desa dengan menanamkan gotong royong, partisipasi umum dan emansipasi masyarakat di lingkup desa (Ihsan, 2018).

Selain itu, BUMDes ialah pondasi ekonomi di desa serta berperan sebagai untuk sosial dan komersial (Lestari, 2021). Peran sosialnya, mengedepankan kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat dalam bidang pelayanan publik. Lalu peran komersialnya, menghasilkan keuntungan dari menyediakan kemampuan asli Desa. Faktor guna menghasilkan peningkatan partisipasi ialah pengelolaan BUMDes dengan asas berkomunikasi yang baik dan bekerjasama selama kegiatan BUMDes (Ibrahim, dkk., 2020).

Terbentuknya BUMDes didasarkan pada ketentuan hukum Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 87 ayat (1) berbunyi: “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”, dan ayat (2) berbunyi: “BUMDesa dikelola atas dasar kekeluargaan dan kegotongroyongan”, dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut: “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen pemerintah desa dan masyarakat untuk memutar roda perekonomian dengan membentuk lembaga ekonomi desa melalui badan usaha milik desa langsung dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat (Endah, 2019).

Potensi BUMDes sebagai organisasi komersial masyarakat di desa untuk menjamin lahirnya kesejahteraan. Masyarakat pedesaan dapat mencapai kemampuan penuh mereka, lalu akhirnya mereka mendapatkan penghasilan cukup banyak yaitu diperlukan pembalikan

alokasi dan kebijakan sumber daya alam (Munir, et al., 2020). Salah satu peran lahir BUMDes ialah mendukung perkuatan roda ekonomi ruang lingkup desa. Pendapatan awal desa dapat dijadikan acuan untuk mengetahui desa berkembang atau tidak (Supardi, 2021).

Dalam pelaksanaannya, Bumdes masih menunjukkan ketimpangan serta tidak meluas. Permasalahan mengurus BUMDes pada beberapa tingkat daerah antara lain terbatasnya macam usaha untuk dikelola, terbatasnya pengurus BUMDes, serta rendahnya tingkat keterlibatan Rakyat karena pengetahuan yang dimiliki masih belum cukup (Agunggunanto, et al., Rahmawati, 2020). Kenyataan bahwa masyarakat desa masih belum menyadari posisinya untuk merangkul desa dan menjadikan desa sebagai pusat ekonomi belum menjadi tujuan. Ironisnya lagi, BUMDes dipandang bagi sebagian elit pemerintah di Desa untuk mendapatkan peti-peti ilegal (Lumintang, 2020). Adanya gerakan desentralisasi, khususnya di desa tidak menjamin demokrasi akan diperbarui jika struktur elit lama tetap bermain dan mendominasi politik desa dan kekuasaan elit desa lama yang merupakan warisan dari struktur Baru, serta tidak mudah menarik pengaruh era orde baru (Firdaus, 2018).

Untuk meningkatkan BUMDes, diperlukan pengelola professional dengan melaksanakan tugas secara disiplin, baik dari segi pendidikan maupun pengalaman kerja, serta memiliki keahlian berkomunikasi dengan masyarakat di ruang lingkup desa (Dunggio, 2020). Selain itu, untuk memperkuat eksistensi BUMDes agar masyarakat umum mengetahui produknya, diperlukan pemasaran digital yang baik. Digitalisasi pemasaran dengan teknologi harus diterapkan dalam promosi usaha kecil di pedesaan seperti BUMDes (Sanjaya, dkk., 2020). Isi dan filosofi BUMDes harus menanamkan semangat solidaritas dan disiplin diri dengan tujuan memperkuat aspek ekonomi organisasi (Wowor, dkk., 2019).

Berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Cibadak, masih terdapat BUMDes yang gagal dan belum sepenuhnya terwujud peningkatan roda ekonomi Masyarakat Desa. Pengelolaan dana terpantau terdapat situasi perputaran modal kurang sehat akibat tidak sedikit nasabah peminjam uang ke BUMDes tidak mengembalikannya.

Mengacu pada model Fayol sebagai aliran pemikiran untuk menganalisis pengelolaan BUMDes oleh pemerintah desa di Desa Cibadak Kecamatan Karawang yaitu: Pertama, perencanaan merupakan tahapan tingkat awal dari manajemen, karena tujuan manajemen meliputi 4 indikator yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Kusnadi, 2022). Perencanaan bersifat berubah – ubah tergantung kondisi. Perencanaan adalah identifikasi tahapan awal organisasi agar dapat meraih cita - citanya dan upaya meramal kebutuhan kedepan.

Kedua, Pengorganisasian (Organizing), Henry Fayol mengemukakan

bahwa pengorganisasian ialah penetapan tugas diberikan dari pimpinan organisasi, sehingga terpusat atas satu arahan pimpinan. Pengorganisasian yang dimaksud Henry Fayol ialah penerapan pembagian dalam tugas kerja Pegawai, fokus arah tujuan, perintah satu pimpinan, struktur tingkatan lembaga. Ketiga, implementasi (*Implementation*), Pelaksanaan Menurut Henry Fayol bertujuan untuk memberikan orientasi bagi Pegawai atau SDM yang merupakan penggerak agar melaksanakan tugasnya dengan benar.

Keempat, Pengawasan (*Controlling*), Pengawasan menurut Fayol adalah kegiatan memantau, mendemonstrasikan serta menetapkan atas semua kinerja yang telah dilewati berjalan sesuai tujuan organisasi. Unsur pengawasan berguna dalam menetapkan bahwasannya kinerja yang diberikan sudah cocok pada kerangka semula serta guna evaluasi dan memberikan solusi yang tepat atas masalah (solusi) penyimpangan yang signifikan (berarti).

METODOLOGI (Material dan Metode)

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ialah metode deskriptif dipadukan kualitatif dan analisis datanya induktif. Secara khusus Peneliti bermaksud memberikan analisa mendalam bagaimana pemerintah desa mengelola BUMDes Desa Cibadak Kecamatan Karawang. Agar memperoleh hasil dari situ perihal pengelolaan pemerintahan telah benar atau belum.

Sumber Data

Sumber data berfungsi mendukung penelitian ialah data primer dan data sekunder dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam Manajemen Pemerintah Desa perihal mengurus BUMDes di Desa Cibadak Kecamatan Karawang, meliputi: Pertama, data primer dari observasi dan wawancara kepada informan dengan menanyakan tentang pengelolaan BUMDes Desa Cibadak Kecamatan Karawang. Kedua, data sekunder diperoleh dengan membaca buku-buku literatur, dokumen hukum, majalah dan berita lainnya di media online terkait isu-isu terkait pengelolaan pemerintah kewenangan desa perihal mengurus BUMDes Desa Cibadak Kabupaten Karawang.

Teknik Pengumpulan Data

Mencakup tiga cara yaitu Pertama, wawancara mengenai Manajemen Pemerintah Desa perihal mengurus BUMDes Desa Cibadak Kabupaten Karawang; Kedua, Observasi ke Desa Cibadak agar memahami Manajemen Pemerintah Desa perihal mengurus BUMDes Desa Cibadak Kabupaten Karawang; Ketiga, Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Mencakup 3 (tiga) jenis kegiatan dalam proses penelitian: Pertama, mereduksi data

yaitu menyiapkan data yang diperoleh kemudian menentukan data yang cocok dengan penelitian ini dengan klasifikasi yang ada. Sementara data yang kurang relevan dikecualikan. Data yang relevan terkait dengan masalah utama yang diidentifikasi; Kedua, data display atau penyajian data, yaitu penyajian berbagai informasi data yang telah dianalisis untuk memberikan analisa yang dilakukan; dan Ketiga, menarik kesimpulan dan verifikasi yaitu kesimpulan awal sebagai langkah awal untuk menarik kesimpulan akhir.

PEMBAHASAN

Perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa Cibadak dalam pengelolaan BUMDes di Desa Cibadak Kabupaten Karawang

Perencanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah Manajemen untuk melakukan sebuah langkah awal dalam menentukan sebuah keputusan. Perencanaan dalam BUMDes sangatlah penting perihal merencanakan pengelolaan ke arah lebih baik. Pada Desa Cibadak, Pemerintah Desa belum dapat melakukan perencanaan BUMDes dengan benar, terbukti tidak sedikit BUMDes terhenti. Apabila perencanaan dilakukan baik, tentunya arah dan tujuan pengelolaan akan menghasilkan keuntungan bagi Desa. Padahal Pemerintah Desa sudah menyiapkan dana yang baik dalam pembiayaan Dana, namun faktanya tidak menghasilkan pemasukan yang baik atau sedikit ke Desa, sehingga dana pengelolaan menipis.

Perencanaan terkait pengelolaan BUMDes terkait inovasinya masih sangat kurang sehingga tidak menghasilkan keuntungan yang baik. Kurangnya kolaborasi dengan teknologi dalam perencanaannya juga menjadi faktor kurang majunya perencanaan dalam pengelolaannya.

Pengorganisasian yang dilakukan Pemerintah Desa Cibadak dalam pengelolaan BUMDes di Desa Cibadak Kabupaten Karawang

Pengorganisasian merupakan aspek selanjutnya yang berfokus pada pembagian tugas ke arah perencanaan yang telah dibuat. Pengorganisasian BUMDes sangat penting, sebab jika tidak ada pengorganisasian tentunya pembagian kerja setiap pihak tentunya akan tidak baik dan menghambat jalannya sebuah pengelolaan yang baik. Pada Desa Cibadak, Pemerintah di Desa untuk pengorganisasian terkait pengelolaan BUMDes sangat buruk, tidak adanya kemajuan yang baik dalam BUMDes yang aktif atau jalan ditempat. Pengorganisasian yang dilakukan kurang transparan terhadap Masyarakat dan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusRemBang) Desa kurang dibahas sehingga tidak sedikit Masyarakat yang peduli akan BUMDes.

Pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah Desa Cibadak dalam pengelolaan BUMDes di Desa Cibadak Kabupaten Karawang

Pelaksanaan merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam kemajuan penegelolaan. Pada pengelolaan BUMDes, Pelaksanaan ialah tahapan untuk mewujudkan tujuan yang sudah diterapkan oleh bersama. Pada Desa Cibadak, Pemerintah Desa Cibadak belum mengurus BUMDes Cibadak dengan benar dan terbilang kurang konsisten. Belum adanya sebuah kebijakan atau langkah baru yang nyata, ditambah masa pandemi ini membuat semakin kurang terjaminnya kelangsungan Badan Usaha Milik Desa akibat kurangnya anggaran Pemerintah yang berfokus pada penanganan pandemi.

Faktor yang membuat terhambatnya BUMDes Cibadak yang lain yaitu produk lokal Pemerintah Desa Cibadak seperti kripik keong terhenti akibat kalah bersaing dengan produk lokal dari desa lain yang lebih giat mempromosikan ke media sosial. Ditambah dana pinjaman yang diberikan Masyarakat tidak kunjung diganti dari peminjam, sehingga mendapat rugi dan tidak mendapat keuntungan.

Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Desa Cibadak dalam pengelolaan BUMDes di Desa Cibadak Kabupaten Karawang

Pengawasan merupakan aspek yang berfokus pada pemantauan dan bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi. Pengawasan sangatlah diperlukan untuk pelaksanaan BUMDes Cibadak seperti pengawasan dalam anggaran. Pada Desa Cibadak, pengawasan yang dilakukan masih sangat minim sehingga BUMDes Cibadak tidak menghasilkan keuntungan yang baik bagi Desa. Serta dalam pengawasan anggaran terkait BUMDes masih terbilang kurang peduli. Pemerintah di Desa Cibadak untuk pengawasan anggarannya, kurang melibatkan Masyarakat sehingga Masyarakat tidak peduli dan bahkan tidak paham.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu hasil peneliti, dapat ditarik kesimpulan Pertama pada aspek Perencanaan, Pemerintah Desa belum dapat melakukan perencanaan BUMDes dengan baik, terbukti tidak sedikit BUMDes yang terhenti. Perencanaan terkait mengurus BUMDes terkait inovasinya masih sangat kurang sehingga tidak menghasilkan keuntungan yang baik. Kurangnya kolaborasi dengan teknologi dalam perencanaannya juga menjadi faktor kurang majunya perencanaan dalam pengelolaannya

Kedua, pada aspek Pengorganisasian Pada Desa Cibadak, Pemerintah di Desa perihal pengorganisasian terkait pengelolaan BUMDes sangat buruk, tidak adanya kemajuan yang baik perihal BUMDes yang aktif atau jalan ditempat. Pengorganisasian yang dilakukan

kurang transparan terhadap Masyarakat dan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusRemBang) Desa kurang dibahas sehingga tidak sedikit Masyarakat yang peduli akan pengelolaan BUMDes.

Ketiga dalam aspek Pelaksanaan, Pemerintah Desa Cibadak belum melaksanakan pengelolaan BUMDes yang baik dan terbilang kurang konsisten. Belum adanya sebuah kebijakan atau langkah baru yang nyata, ditambah masa pandemi ini membuat semakin kurang terjaminnya kelangsungan Badan Usaha Milik Desa akibat kurangnya anggaran Pemerintah yang berfokus pada penanganan pandemi. Faktor yang membuat terhambatnya BUMDes Cibadak yang lain yaitu produk lokal Pemerintah Desa Cibadak seperti kripik keong terhenti akibat kalah bersaing dengan produk lokal dari desa lain yang lebih giat mempromosikan ke media sosial. Ditambah dana pinjaman yang diberikan Masyarakat tidak kunjung diganti dari peminjam, sehingga mendapat rugi dan tidak mendapat keuntungan.

Keempat pada aspek Pengawasan, pengawasan Pemerintah Desa yang dilakukan masih sangat minim yang menyebabkan proses berjalannya BUMDes belum menghasilkan keuntungan yang cukup bagi Desa. Serta dalam pengawasan anggaran terkait BUMDes masih terbilang kurang peduli. Pemerintah di Desa Cibadak perihal pengawasan anggaran BUMDes kurang melibatkan Masyarakat sehingga Masyarakat tidak peduli dan bahkan tidak paham.

Saran

Mengacu penelitian penulis diatas, peneliti merekomendasikan sedikit saran, diantaranya: Pertama, Pemerintah di Desa Cibadak dalam aspek perencanaan, harus membuat sebuah inovasi perencanaan yang baik dengan berkolaborasi dengan teknologi sehingga BUMDes dapat maju. Kedua Pemerintah Desa Cibadak dalam aspek pengorganisasian, sebaiknya Pemerintah lebih transparan terhadap Masyarakat dan dalam MusRemBang harus digiatkan kembali dalam pembahasannya

Ketiga Pemerintah Desa Cibadak dalam aspek pelaksanaan, harus bisa membuat sebuah kebijakan atau langkah baru dan harus juga dapat menyeimbangkan antara kebutuhan BUMDes dan Pandemi dalam hal anggaran, serta tak pula membuat sebuah sanksi yang tegas pada peminjam apabila tidak mengembalikan uang sesuai peraturan simpan pinjam sehingga BUMDes tidak terhambat. Keempat Pemerintah Desa Cibadak dalam aspek Pengawasan, sebaiknya dilakukan secara konsisten dengan melibatkan Masyarakat.

REFERENSI

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Arlan, A. S. B. (2019). Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. *Al'iidara Balad*, 2(1), 37-44.
- Dunggio, S. (2020). Pengaruh Kemampuan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 3(1), 15-24.
- Endah, K. (2019). Mewujudkan kemandirian desa melalui pengelolaan badan usaha milik desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 25-33.
- Firdaus, S. (2018). Fenomena Elite Capture Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 20-37.
- Hayyuna, R. (2014). *Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Ibrahim, M., Mustanir, A., & Adnan, A. A. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Movere Journal*, 2(2), 56-62.
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 221-230.
- Kusnadi, H. I. H., & Sos, S. (2022). Tingkatan Manajemen Dan Fungsi-Fungsinya. *Pengantar Manajemen (Konsep dan Tinjauan Teoretis)*, 267.
- Koso, J., OGOTAN, M., & Mambo, R. (2018). Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(51).
- La Suhu, B., Djae, R. M., & Sosoda, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Government of Archipelago-Jgoa*, 1(1).
- Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan IlmuPolitik*, 8(4), 367-371.

- Lumintang, J., & Waani, F. J. (2019). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. *The Studies of Social Sciences*, 2(1), 15-21.
- Lestari, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 3(1).
- Munir, M., Hidayah, N. M., Khoeriyah, N. M., & Setianingsih, O. (2020). Manajemen Pemasaran dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Purwosari Kecamatan Puring. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(01), 59-68.
- Rahmawati, E. (2020). Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (bum desa) di kabupaten bandung barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 1-13.
- Sanjaya, P. K. A., Hartati, N. P. S., & Premayani, N. W. W. (2020). Pemberdayaan pengelola badan usaha milik desa (BUMDes) berdikari melalui implementasi digital marketing system. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 65-75.
- Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 4(2), 139-148.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen pada Bumdes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. doi, 10.
- Susanti, I., Syairozi, M. I., & Lukman, H. Y. W. (2021). Analisis Sistem Manajemen Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Bluluk. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 701-710.
- Wawancara dengan Ibu Siti Juleha (Sekretaris Desa) di Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang tanggal 20 Februari 2022 di Kantor Kepala Desa Cibadak Kabupaten Karawang.
- Wawancara dengan Bapak Reza Hardian (Masyarakat di Desa Cibadak Kabupaten Karawang) tanggal 20 Februari 2022 di Depan Kantor Kepala Desa Cibadak Kabupaten Karawang.
- Wowor, M., Singkoh, F., & Waworundeng, W. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).